

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Faniyah, Iyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Fuady, Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Marilang, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, 2017.
- Pasek, Made I, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Purba, Bonaraja, Chaerul Muhammad, Bachtiar Erniati, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta, dan Gagasan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Ratih Wulandari, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.

Jurnal

- Alexander, Edwardi dan Christina, Nita, “*Law Protection for Procurement Officers: Legal Protection against the Procurement Instrument of Goods and Services*,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175, 2018.
- Bert, Jab Koops, “*The Trouble with European Data Protection Law*,” *International Data Privacy Law*, Vol. 4 No. 4, 2014.
- Ismail, Saleh, “*Implikasi Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*,” *Jurnal Privat Law* Vol. II, No. 5, 2014.

- Kornelius, Benuf, “Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No 2, 2020.
- Nabilla, Desyalika Putri dan Dian, Agung Wicaksono, “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat (*Legislation Implication Of The Takeover Authority In Mineral And Coal Mining By The Central Government*),” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 01, 2016.
- Putu, Putra Pradiatmika, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Suwari, Akhmaddhian dan Asri, Agustiwi, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli secara Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3 No 2, 2016.
- Tesalonika Roring, “Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VIII No. 2, 2020.
- Victor, Imanuel Williamson Nalle, “Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3, 2012.
- Zaherman, Armandz Muabezi, “Negara berdasarkan Hukum (*Rechtstaats*) bukan Kekuasaan (*Machtstaat*) *Rule of Law and Not Power State*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No 3, 2017.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6525.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4380.

Internet

“Arutmin Indonesia Menanti Perpanjangan Izin IUPK dari Pemerintah”, <https://industri.kontan.co.id/news/arutmin-indonesia-menanti-perpanjangan-izin-iupk-dari-Pemerintah>, diakses 20 Oktober 2020.

“Perpanjangan Operasi KK dan PKP2B Tidak Otomatis”, <https://investor.id/business/perpanjangan-operasi-kk-dan-pkp2b-tidak-otomatis>, diakses 16 Oktober 2020.